

UU Ciptaker Disahkan, Airlangga: Urgensinya Pemulihan Ekonomi Lewat Investasi

Menko Bidang Perekonomian Hartarto menjelaskan urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Salah satu urgensinya adalah pemulihan ekonomi usai pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina. Menko Perekonomian mengatakan kombinasi pandemi dan konflik geopolitik menyebabkan disrupsi pada rantai pasokan dan menyebabkan harga-harga komoditas global meroket. Akibatnya, permintaan secara global melemah dan menaikkan potensi resesi. "Lembaga internasional terus menurunkan proyeksi perekonomian global, seperti proyeksi IMF per Januari 2023 akan jauh di bawah potensinya, yaitu tumbuh 2,9 persen year-on-year (yoy)," kata Airlangga pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (21/3). Oleh karenanya, menjadi undang-undang yang dapat memutar roda ekonomi, terutama kebijakan sektor ketenagakerjaan. Airlangga menyebut UU Ciptaker akan memperluas kesempatan asing di Indonesia. "Bank Dunia melaporkan pada Desember 2022, pasca UU Cipta Kerja diterbitkan, Indonesia jadi negara terbesar kedua penerima Foreign Direct Investment (FDI) di Asia Tenggara," jelas Airlangga. Begitu juga OECD melaporkan bahwa implementasi UU Cipta Kerja dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi hampir 10 persen, sambungnya. Selain itu, Airlangga juga memaparkan tingkat PMA meningkat hampir 30 persen dalam 5 triwulan setelah terbitnya UU Ciptaker. Hal ini, menurut Airlangga, menunjukkan respon positif dari investor terhadap UU Ciptaker. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil dan inkonstitusional bersyarat. Pemerintah kemudian diminta melakukan perbaikan prosedur dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam periode tersebut, tidak dibolehkan membuat kebijakan strategis yang berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan yang baru. Hal ini menciptakan kegamangan bagi investor dan pelaku usaha. "Ini menciptakan kegamangan bagi investor dan pelaku usaha, dan memutuskan wait and see terkait keputusan investasi," kata Menko. Airlangga menutup sambutannya dengan mengatakan putusan MK harus

segera dilaksanakan. Perppu akhirnya dipilih dengan pertimbangan waktu dan birokrasi.